

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Misi MINUSTAH di Haiti Tahun 2004-2017

I Wayan Surya Edi¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: iwayansuryaedi@gmail.com¹⁾, ratihkumaladewi@unud.ac.id²⁾, kawitriresen@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to explain how sexual violence in the form of Sexual Exploitation and Abuse occurred in Haiti during the MINUSTAH peace mission through the perspective of liberal feminism that occurred in 2004 to 2017. One of MINUSTAH's mandates related to the protection of civilians, namely the mandate of the PoC. Women in Haiti who have little education and military culture which are usually dominated by men encourage the placement of armed forces in the hands of many men. This indirectly increases men's access to SEA. For Liberal Feminists, women as a group is only protected from all forms of violence done by armed groups but not by peacekeepers. For Liberal Feminists, increasing the number and role of women in peace missions in all fields can reduce the existing hypermasculinity which has also become one of the factors causing SEA.

Keywords: Haiti, MINUSTAH, SEA, Liberal Feminism

1. PENDAHULUAN

PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) lahir dengan tugas dan kewajiban untuk menjaga perdamaian dunia serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dalam wilayah yang sedang menghadapi konflik, PBB hadir sebagai organisasi internasional yang mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi dengan tujuan untuk memperjuangkan dan menegakkan HAM serta mengembalikan kestabilan keamanan wilayah tersebut. Dalam piagam PBB Bab VII pasal 39 dijelaskan "*The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security*" (Jerry, 2013). Itu berarti

segala ancaman terhadap perdamaian dunia perlu ditindaklanjuti demi menegakkan Hak Asasi Manusia. PBB kemudian memutuskan untuk melakukan operasi perdamaian di Haiti melalui pembentukan MINUSTAH (Mission de Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti) melalui resolusi DK PBB 1542 pada tanggal 30 April 2004 (Heine dan Thompson, 2011). MINUSTAH merupakan misi perdamaian yang dibentuk oleh PBB untuk menjaga keamanan di Haiti hingga negara tersebut stabil secara politik, sosial, ekonomi dan keamanan.

Misi MINUSTAH resmi berjalan pada 1 Juni 2004 dengan melibatkan 6700 personel militer, 1622 polisi, 550 warga sipil internasional, 150 sukarelawan dan sekitar 1000 warga sipil lokal (Rodrigo, 2011). Pembentukan MINUSTAH (*Mission de Nations*

Unies pour la Stabilisation en Haïti) melalui resolusi DK PBB 1542 pada tanggal 30 April 2004 (Heine dan Thompson, 2011). Melalui misi itu MINUSTAH memegang mandat antara lain: 1) mendukung transisi pemerintahan dengan memastikan kestabilan dan keamanan wilayah; 2) membantu pemantauan dan mereformasi Kepolisian Nasional Haiti; 3) membantu kelanjutan pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi (DDR); 4) restorasi dan pemeliharaan aturan hukum, keamanan publik dan ketertiban umum di Haiti; 5) melindungi personil, fasilitas, instalasi, dan peralatan PBB serta protect civilian; 6) mendukung proses konstitusi dan politik; 7) membantu dalam mengatur, memantau, dan pelaksanaan pemilu parlemen dan presiden serta menjaga kota agar tetap bebas dan aman; 8) mendukung transisi pemerintahan sesuai dengan institusi HAM di Haiti dalam rangka melindungi dan mempromosikan HAM; 9) memonitor dan melaporkan situasi HAM di negara tersebut. Setelah itu ada beberapa mandat tambahan yaitu resolusi tahun 2005 tentang keamanan, politik, serta situasi sosial ekonomi di Haiti (Robert, 2005).

Diantara semua mandat MINUSTAH, ada mandat Protect of Civilian. Mandat Protect of Civilian tersebut merupakan mandat penting yang terkait dengan mandat *human rights* (HAM). Mandat tersebut penting bagi PBB dalam setiap misi perdamaian karena merupakan salah satu peran kunci misi perdamaian PBB. Peran penting PBB dalam setiap misi perdamaian adalah memberikan perlindungan terhadap warga sipil yang

termasuk wanita dan anak-anak dari segala bentuk tindak kekerasan (EEAS, 2018). Selain itu, mandat *Protect of Civilian* (PoC) merupakan upaya mengamankan hak mereka terhadap kebutuhan yang mendasar serta menciptakan lingkungan yang aman bagi warga sipil untuk jangka panjang.

Protect of Civilian menjadi fokus penelitian ini karena PoC merupakan letak peran misi PBB dalam menegakkan HAM. PoC juga merupakan letak tercapainya keberhasilan misi PBB yang selalu dikaitkan dengan perlindungan dari tindak kekerasan terhadap wanita dan anak-anak yang dalam hal ini dikategorikan sebagai perlindungan dari Sexual Exploitation and Abuses (SEA). Di dalam mandat ini, PBB mempunyai misi sesuai dengan aturan hukum humaniter internasional yaitu melindungi pihak yang rentan dalam konflik yang dalam hal ini yaitu wanita dan anak-anak dari segala bentuk tindak kekerasan termasuk SEA. Namun dalam kenyataannya, hampir setiap misi PBB, kasus SEA menjadi sorotan karena seringkali terjadi dan dilakukan oleh peacekeeper itu sendiri. Misi PBB yang seharusnya menjadi pelindung bagi warga sipil dan menjamin keamanan mereka dari segala bentuk kekerasan justru gagal dan membawa PBB menjadi salah satu pihak yang termasuk dalam daftar pelaku SEA.

Munculnya SEA (*Sexual Exploitation and Abuses*) yang dilakukan oleh *peacekeeper* yang menjadi sorotan bagi misi MINUSTAH menjadi catatan hitam bagi misi perdamaian PBB. Di tahun 2015, berdasarkan laporan PBB ada sekitar 231 kasus dugaan terhadap

transaksi seks. (KONAMAVID & OFARC, 2016). Jumlah dugaan kekerasan terkait dengan SEA di misi MINUSTAH dari tahun 2008 hingga 2015 diperkirakan berjumlah 564. Dimana 42 korban diantaranya berhasil di interview dan diinvestigasi (Johnston, 2017). Banyaknya angka SEA yang terjadi di misi MINUSTAH dimana dalam SEA juga terjadi pertukaran antara kebutuhan hidup dengan transaksi seksual menjadi daya tarik bagi peneliti. Mandat yang sedemikian rupa dilindungi oleh hukum internasional dan dibuat untuk melindungi kaum yang dianggap rentan saat konflik justru merupakan mandat yang seringkali tidak tercapai dan diikuti oleh catatan kelam SEA. Maraknya SEA yang terjadi walaupun sudah ada hukum yang tidak mentoleransi kasus tersebut mendorong peneliti untuk mencari tahu lebih lanjut penyebab atau pendorong terjadinya kasus SEA dalam misi perdamaian PBB terutama pada misi MINUSTAH yang dimana dalam misi ini disebut-sebut sebagai salah satu misi yang selalu menjadi contoh catatan kelam terjadinya SEA oleh PBB sendiri.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penulis menggunakan lima tulisan sebagai kajian pustaka. Tulisan pertama penulis menggunakan tulisan dari Scheffer (2016) yang berjudul *The Protection of Civilians in Armed Conflicts*. Dalam tulisannya Scheffer (2016) Menjabarkan tentang protect civilian di dalam wilayah konflik yang didalamnya memuat tentang apa itu sebenarnya perlindungan terhadap warga

sipil. Disamping mendefinisikan tentang *protection of civilian*, kajian ini juga mendefinisikan bagaimana PBB melakukan *protect of civilian* di berbagai macam tahapan konflik Kajian ini dipilih oleh penulis guna menjadi acuan untuk melihat bagaimana dan kapan intervensi militer seperti aktivitas peacekeeping dimulai.

Tulisan kedua penulis menggunakan tulisan dari Kathleen M. Jennings (2008) yang berjudul *Protecting Whom?-Approaches to sexual exploitation and Abuse in UN Peacekeeping Operations*. Dalam tulisannya Kathleen M. Jennings (2008) mengkaji dampak dan implikasi ZTP dalam mengatasi SEA di Haiti dan Liberia. Dimana dalam kedua misi tersebut menggunakan dua pendekatan yang berbeda dalam proses implementasinya. Selain itu, penelitiannya juga mengkaji sejarah pembentukan ZTP yang awalnya didahului dengan ambiguitas makna transaksi seksual. Sehingga dalam ZTP lebih diperjelas mengenai apa yang termasuk dalam kategori transaksi seksual yang dilarang dalam misi perdamaian. penelitian ini membantu penulis untuk melihat sejauh apa peran PBB sendiri mengidentifikasi serta berupaya menghapus segala bentuk SEA yang seringkali terjadi di misi perdamaian PBB termasuk misi MINUSTAH di Haiti.

Tulisan ketiga penulis menggunakan tulisan dari Bellamy dan William (2010) yang berjudul *Peace Operation in Global Politics dalam buku Understanding Politics*. Dalam tulisannya Bellamy dan William (2010) memaparkan bahwa operasi perdamaian

mempunyai fokus menyelesaikan konflik antar negara. Untuk melihat lebih jauh, Bellamy memberi tolok ukur yaitu melihat pada pendekatan *westphalian* dan *traditional peacekeeping*. Bellamy juga menjelaskan bahwa untuk menjelaskan tantang *neutrality, impartiality and use of minimum force* tidaklah mudah namun setidaknya ada yang bisa dijadikan acuan untuk dapat melihatnya yaitu dengan melihat pada mandat *peacekeeper* itu sendiri. Kajian ini dipilih oleh penulis guna menjadi acuan untuk memahami perkembangan operasi perdamaian dan apa saja yang harus dipenuhi oleh *peacekeeper* dalam operasi perdamaian.

Tulisan keempat penulis menggunakan tulisan dari Suki Ali, Kelly Coated and Wangui wa Goro (2000) yang berjudul *Global Feminist Politics*. Dalam tulisannya Suki Ali, Kelly Coated and Wangui wa Goro (2000) buku ini menggambarkan bagaimana perjuangan kaum feminisme yang terus menuntut kesetaraan antara peran wanita dan pria. Dimulai dengan pemahaman akan sistem patriarki itu sendiri serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan bahwa feminisme pada esensinya hanya menuntut kesetaraan akses bukan menghapus sistem yang ada. Dimana seharusnya ditengah sistem patriarki, feminisme bisa diterima dan wanita bisa mendapatkan akses yang sama dengan pria sehingga bisa terhindar dari segala bentuk kekerasan yang diakibatkan oleh pria yang superior secara kedudukan.

Tulisan terakhir penulis menggunakan tulisan dari Gina Heatcoth (2011) yang berjudul

Feminist Politics and The Use Of Force: Theorising Feminist Action and Security Council Resolution 1325. Dalam tulisannya Gina Heatcoth (2011) menjelaskan tidak adanya analisis feminisme dalam program PBB untuk mencegah Sexual Abuse and Exploitation. Dijelaskan juga bahwa diperlukannya partisipasi wanita bukan hanya dalam jumlah wanita yang terlibat namun juga pengembangan atau training wanita di bidang Pendidikan dan institusi lainnya

Dari lima tulisan diatas, penelitian ini mengambil dua konsep sebagai kerangka pemikiran yaitu: Peacekeeping dan Sexual Exploitation and Abuse (SEA) serta Feminisme Liberal. Konsep *Peacekeeping* disini membantu peneliti untuk melihat lingkup aktivitas perdamaian sehingga peneliti lebih bisa mengerucutkan terletak di dalam mandat mana perlindungan terhadap wanita harus ditegakkan. serta penulis melihat perlindungan wanita dari bentuk SEA sudah diatur dalam Hukum Internasional yang ada di mandat *protect of civilian* dimana mandat tersebut ada dibawah mandat penegakan HAM. Sehingga konsep *peacekeeping* dianggap dapat membantu penulis untuk melihat terjadi pelanggaran pada mandat apakah SEA itu dan seharusnya seperti apa mandat itu diatur dalam hukum internasional.

Sedangkan pada konsep *Sexual Exploitation and Abuse* (SEA) membantu penulis menganalisa apa saja yang termasuk dalam kategori SEA. Dan apakah SEA merupakan salah satu konsep dalam aktivitas perdamaian. Serta dari konsep tersebut

membantu penulis melihat faktor-faktor penyebab SEA sehingga peneliti analisisnya bisa lebih spesifik lagi dan bisa lebih fokus mengacu pada faktor-faktor penyebab SEA yang dijabarkan oleh konsep SEA itu sendiri.

Feminisme liberal dipilih penulis untuk memetakan pemikiran dalam penelitian ini dari sudut pandang feminisme liberal dimana sudut pandang tersebut menuntut keterlibatan wanita yang dalam hal ini adalah keterlibatan wanita dalam aktivitas perdamaian. Jika wanita tidak dilibatkan dalam aktivitas perdamaian maka yang tetap dominan adalah sudut pandang maskulin dimana sudut pandang tersebut jika dipertahankan bisa saja SEA terus terjadi karena cenderung pemikiran atau keterlibatan laki-laki yang lebih banyak akan kurang melihat sudut kerentanan wanita sehingga seringkali wanita tidak dianggap sebagai penyintas yang perlu dijunjung haknya melainkan hanya akan dilihat sebagai korban dan objek yang bisa dimanfaatkan selagi imunitas melekat dalam setiap *peacekeeper*.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan data kualitatif dan dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia (Sulistyo, 2010). Sedangkan data kualitatif yang dimaksud yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka

(Noeng, 1996) Unit analisis yang penulis gunakan adalah sistem internasional yaitu sistem operasi perdamaian di Haiti maka dari itu penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu datayang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (Sumadi, 1987). Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang berupa buku, jurnal maupun situs resmi yang berhubungan dengan kajian penelitian serta teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka serta penelusuran online. menurut M. Nazir, studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan (M.Nazir, 2003). Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran pada website resmi UN *peacekeeping*, surat kabar online, serta website situs buku dan jurnal akademis online.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sexual Exploitation and Abuse di Haiti

SEA merupakan bentuk pelanggaran dalam sebuah norma dan aturan internasional secara universal serta merupakan tindakan

yang dilarang dalam kode etik staff UN dalam setiap aktivitasnya termasuk dalam aktivitas perdamaian. SEA dianggap sebagai tindakan yang berakibat fatal dan merupakan isu yang sangat penting karena dampak psikologis, fisik dan ekonomi yang dialami oleh korban SEA, termasuk salah satunya yaitu penyebaran penyakit HIV/AIDS. (CCCPA, 2018, pp.41-42).

Dalam menjalankan misinya, MINUSTAH melakukan tindakan SEA terhadap wanita di Haiti dimana seharusnya wanita tersebut dilindungi sesuai dengan mandat yang tercantum dalam resolusi saat mereka diterjunkan. Berdasarkan sejarah yang ada di Haiti, wanita di Haiti memang pada dasarnya memang sudah rentan terhadap tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Sehingga adanya konflik yang pecah ditambah dengan adanya intervensi dari luar saat konflik mengakibatkan posisi wanita di Haiti semakin rentan lagi termasuk mendapatkan tindakan kekerasan seksual berupa pemerkosaan dari kelompok atau geng yang terlibat dalam konflik maupun tentara yang tergabung dalam peacekeeper itu sendiri. Dimana semua itu lebih banyak didominasi oleh pria daripada wanita. Dalam konsep SEA sendiri ada beberapa penyebab terjadinya SEA dimana faktor atau penyebab itu ada dalam lingkungan Haiti. Penyebab tersebut antara lain: Pertama, timpang atau minimnya akses terhadap wanita merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya SEA secara tidak langsung. Manusia membutuhkan akses yang sama terhadap kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Perbedaan akses yang timpang antara

wanita dan pria mendorong pihak yang dominan untuk berlaku semena-mena dengan akses dan *power* mereka. Ketimpangan akses antara wanita dan pria secara perlahan menghantarkan wanita untuk menjadi lebih rentan akan tindak SEA terutama dalam hal *sexual exploitation*. Cenderung memberikan akses pada anak laki-laki pada pendidikan mendorong mereka memiliki kesempatan yang lebih besar dan luas dibandingkan wanita dalam bekerja, sehingga pria mempunyai *skill* untuk mendapatkan pekerjaan disektor-sektor penting termasuk sektor pembuat keputusan dan lain sebagainya yang memang memegang peranan penting bagi masyarakat. Sedangkan wanita, dianggap berpendidikan rendah sehingga suara mereka pun tidak diperhitungkan dan membuat mereka takut untuk berbicara karena merasa tidak mempunyai kapabilitas terkait sektor-sektor penting yang sebenarnya berpengaruh dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh: ketika terkait dengan kekerasan terhadap masyarakat Haiti, pria lebih banyak duduk dalam jabatan yang membuat keputusan sehingga mereka akan mengambil tindakan yang sesuai dengan cara pikir mereka sebagai pria.

Kedua, angka kemiskinan di Haiti juga menjadi factor yang membuat wanita rentan terhadap perilaku SEA. Sebelum diturunkannya MINUSTAH, Haiti sudah merupakan negara yang memiliki angka kemiskinan yang terbilang cukup tinggi. Dimana masyarakatnya sulit mendapatkan akses bahkan untuk kebutuhan penting seperti makanan sehari-hari. Secara keseluruhan hampir 70 persen masyarakat Haiti

hidup dan rentan dalam kemiskinan (Charles, 2014). Bahkan Haiti dari tahun 2000-an sampai 2012 merupakan negara paling miskin di Amerika Latin (World Bank Group, 2012). Angka kemiskinan pada tahun 2000 yaitu pada saat MINUSTAH belum diterjunkan ada paling besar di daerah pedesaan dengan angka mencapai 38% sedangkan terendah di daerah metropolitan ada di angka 20%. Dari tingginya angka kemiskinan tersebut didapat juga data bahwa hanya sekitar 2% masyarakat Haiti yang memiliki penghasilan mencapai \$10 per harinya (World Bank Group, 2012). Hal itu terjadi karena, hampir 60% masyarakat Haiti hidup dalam kemiskinan dengan angka pendapatan harian sekitar \$2. Lebih parahnya ada sekitar 24% hidup dengan pendapatan harian sekitar \$1 (CRS, 2017).

Tingginya angka kemiskinan di Haiti dengan pendapatan yang terbilang sangat rendah membuat 60% keluarga hidup dengan akses yang sangat minim dari beberapa kebutuhan dasar seperti: pendidikan, sanitasi, air bersih, tempat tinggal yang tidak layak dan akses pangan. Kebutuhan rumah tangga di Haiti paling besar menjadi tanggung jawab wanita yaitu sekitar 70% wanita menanggung kebutuhan rumah tangga (Human Rights Swedia, 2012).

Ketiga, Pemerkosaan di Haiti sudah seperti membudaya, dimana pada tahun 1990-an pemerkosaan dilakukan sebagai alat politik. Dan itu melekat sehingga terus terjadi berulang. Budaya yang melekat dimana wanita sebagai alat yang terus dijadikan korban yang tidak pernah bisa bicara karena tidak adanya akses

untuk bersuara membuat mereka terus menjadi korban berulang. Mendorong para intervensi asing yaitu salah satunya *peacekeeper* untuk memanfaatkan imunitasnya dan impunitasnya untuk turut memanfaatkan situasi yang memang terus menyudutkan posisi wanita disana. Di tambah lagi mereka memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang bisa mereka gunakan atau mereka tawarkan kepada wanita di Haiti. Selain itu mereka juga sudah terbiasa dengan wanita yang melakukan pekerjaan sebagai '*sex worker*'. Mereka menganggap hanya cara itulah yang bisa dilakukan oleh wanita yang minim akses untuk bertahan hidup. Walaupun *sex worker* dianggap ilegal secara hukum di Haiti dan biasanya akan dihukum sekitar 15 tahun penjara. Namun pada kenyataannya, para pengguna *sex worker* seringkali tak tersentuh hukum. Sudah banyak sekali industri seks yang ada di Haiti. Kebanyakan para pekerja seks takut melaporkan tindakan tersebut karena justru mereka yang akan dihukum atau malah dicap sebagai pembohong di mata hukum (Daniels, 2018). Hal itu secara tidak langsung juga mendorong terbiasanya pandangan masyarakat lokal melihat aktivitas eksploitasi seksual. Sebagai contoh di kota Port-au-Prince, sebagian besar pelaku pemerkosaan lolos dari tindak peradilan. Dari catatan 62 kasus pelecehan maupun pemerkosaan yang diajukan hanya 25 kasus saja yang benar-benar didaftarkan untuk diproses oleh kepolisian. Sedangkan 37 kasus lainnya tidak bisa diteruskan laporannya dikarenakan para korban takut akan ancaman dari pelaku, takut dilecehkan secara verbal maupun perilaku saat

melapor di kepolisian serta takut akan stigma lingkungan sekitar yang memang mempunyai stigma yang mengucilkan para korban pemerkosaan. Menurut laporan, 25 kasus yang berhasil dilaporkan tersebut ada 11 kasus saja yang berhasil masuk proses investigasi dan ada 4 kasus diantaranya langsung ditolak karena dianggap hanya mengajukan bukti yang sangat minim (UN, 2012). Sedangkan jumlah kasus sisanya dibiarkan menggantung begitu saja tanpa kejelasan.

4.2. Latar Belakang Masuknya Misi MINUSTAH

Haiti merupakan negara yang rentan baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Kepemimpinan yang diktator yang seringkali dipimpin oleh pihak militer yang mempertahankan kekuasaannya melalui tekanan politik mengakibatkan di Haiti seringkali tercipta konflik. Ketidakstabilan politik itupun kemudian mempengaruhi Haiti dari sisi keamanan, sosial dan ekonomi, apalagi banyak korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan yang mengakibatkan Haiti menjadi negara yang termasuk miskin. Faktor-faktor tersebut secara tidak langsung menempatkan Haiti sebagai 'failed states'.

MINUSTAH dirumuskan dan dibentuk oleh DK PBB pada 30 April 2014. Meningkatnya kelompok-kelompok kekerasan yang terjadi di ibukota Port-au-Prince. MINUSTAH resmi diterjunkan pada 1 Juni 2004 melalui resolusi DK PBB 1542 (UN Peacekeeping, 2017). Secara garis besar mandat MINUSTAH yaitu

untuk mendampingi masa pemerintahan transisi dengan memastikan lingkungan yang aman dan stabil. MINUSTAH kembali memperpanjang mandatnya melalui resolusi DK PBB 1840 dan menerjunkan sekitar 7060 tentara dan 2091 staf kepolisian yang akan bekerjasama membentuk dan melatih *Haitian National Police Forces* (Global Policy Forum, 2013). Selain resolusi tambahan tersebut, DK PBB juga menambahkan dan memperpanjang misi MINUSTAH melalui beberapa kali resolusi (Razza, 2018).

Secara rinci, misi MINUSTAH terlebih dahulu dimulai dengan penerjuran MIF (*Multinational Interim Force*) melalui resolusi PBB 1529 bulan februari tahun 2004. Setelah itu, dibentuklah MINUSTAH melalui resolusi PBB 1542 pada bulan April 2004. Selama misi di Haiti, MINUSTAH mendapatkan perpanjangan atau mandat tambahan yang diantaranya terkait dengan penambahan pasukan seperti yang tercantum dalam Resolusi 1608, 1702 dan 1780. Ada juga beberapa mandat tambahan lainnya dibidang keamanan yaitu melalui resolusi 1601, 1743 dan 1840 . Serta ditambah dengan mandat untuk mendukung proses rekonsiliasi yaitu pada resolusi 1576.

4.2.1. Mandat *Protect of Civilian*

Mandat POC merupakan mandat pusat atau utama. Ada hal yang membuat mandat POC tersebut penting, yaitu antara lain:

Pertama, Karena mandat POC merupakan mandat yang menjamin keselamatan dan keamanan warga sipil. Warga

sipil dianggap penting bagi warga misi PKO karena warga sipil merupakan salah satu elemen yang berperan penting juga dalam terciptanya perdamaian. Begitu juga misi PKO dianggap penting karena kehadirannya dianggap mampu melindungi warga yang rentan. Secara tidak langsung misi PKO juga berharap dengan melindungi warga sipil, maka aspek yang lain terkait dengan politik juga bisa berjalan dengan baik.

Kedua, POC merupakan komponen yang dianggap sangat penting bagi proses politik yang damai. Karena ketika warga sipil masih rentan, maka kestabilan keamanan dan politik tidak akan tercipta. Proses politik yang damai tidak akan tercapai kalau masalah keamanan warga sipil masih terancam (Holt, Taylor, and Kelly, 2009). Dalam menjalankan mandat POC, salah satu yang dilakukan oleh MINUSTAH, yaitu memberantas kelompok geng di sekitar Cite Soleil dan sekitarnya. Dalam menjalankan mandat POC, MINUSTAH menggunakan force atau tindakan tegas dan berhasil menangkap beberapa kelompok di tahun 2007. Kelompok-kelompok yang tertangkap merupakan kelompok-kelompok besar. Kemudian mandat POC dilanjutkan dengan mengimplementasikan HNP, serta kerja sama dengan kepolisian setempat, guna menciptakan keamanan bagi warga sipil. Dan dalam hal ini pun, MINUSTAH berhasil menangkap 800 anggota geng. Akhir tahun 2007, ancaman terhadap warga sipil mulai berkurang. Kemudian misinya pun dikurangi perlahan saat ancaman kriminalitas berkurang menjadi misi yang mengacu pada penguatan

komunitas kepolisian yang terdiri dari polisi sipil MINUSTAH dan HNP. Tugas utamanya tetap sama yaitu mengimplementasikan POC, hanya saja pada implementasinya tidak terlalu banyak menggunakan 'use of force' seperti sebelumnya (Hammond, 2012, p. 30).

Secara keseluruhan, mandat POC dianggap sebagai tanggung jawab aktor militer. Secara tidak langsung mereka memiliki beban untuk melindungi warga sipil selama operasi militer berlangsung melalui pencegahan jumlah korban akibat kekerasan yang dilakukan selama operasi militer untuk memberantas kelompok bersenjata. Dengan menjalankan beberapa operasi militer di malam hari (Hammond, 2012, pp. 38-39).

Namun tak bisa dihindari juga bahwa tugas perlindungan bagi warga sipil bukanlah sesuatu yang mudah karena diharuskan metedam kelompok bersenjata yang mengancam warga sipil. Akibat hal tersebut, *peacekeeper* dalam menjalankan mandat itu lebih dipercayakan pada pria daripada wanita.

4.2.2. Kekerasan oleh *peacekeeper*

Mandat perlindungan yang disematkan pada *peacekeeper* tidak sepenuhnya berjalan dan terimplementasi dengan baik. Banyak kekerasan yang terjadi pada wanita, baik itu dalam bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan maupun kekerasan dalam bentuk eksploitasi. Tingkat kekerasan yang terjadi selama misi MINUSTAH pun menjadi catatan hitam tersendiri bagi PBB. Tugas dan misi *peacekeeper* dianggap ternoda oleh adanya

tuduhan SEA. Di tahun 2007 ada sekitar 134 *peacekeeper* yang terlibat dari kasus SEA, namun tidak satupun dari mereka yang dimasukkan ke dalam penjara. Selain itu, tahun 2007 merupakan tahun yang terbesar dalam pemulangan personil *peacekeeper* sejumlah 119 *peacekeeper* yang berasal dari Sri Lanka dipulangkan karena terlibat dalam tindakan prostitusi anak dibawah umur. (UNA-UK, 2017). Secara keseluruhan, hanya sekitar 600 penyintas saja yang bersedia untuk melakukan wawancara untuk menjelaskan apa yang terjadi pada mereka dalam kasus SEA tersebut (Johnston, 2017).

4.3. Penyebab pelanggaran mandat POC oleh *peacekeeper* melalui perspektif Feminisme Liberal

Bagi Feminisme Liberal, aktivitas *peacekeeping* lekat dengan pria dan maskulinitas. Hal itu ada karena pria lebih dipercaya untuk melakukan pengamanan dibanding wanita. Selama hal tersebut masih ada, maka keterlibatan wanita dalam militer atau akses-akses tertentu yang vital dalam misi perdamaian tidak akan pernah sama banyak dengan pria. Hal itu akan berujung juga pada terfokus hanya keamanan secara umum dan mengesampingkan perilaku SEA. Minimnya wanita lokal yang terlibat juga menyebabkan koordinasi dalam pemberian informasi terkait SEA kepada wanita di Haiti juga terbatas.

Kaum Feminis Liberal melihat bahwa PBB memang ada usaha untuk mencegah SEA agar tidak terjadi. Tetapi kaum feminis liberal melihat adanya ketimpangan dimana PBB

memberikan kesempatan pada wanita, namun pihak lokal masih lekat dengan stigma yang beranggapan wanita tidak memerlukan akses atau dianggap tidak mempunyai pendidikan yang cukup untuk terlibat dalam misi untuk menstabilkan negara.

4.3.1. Minimnya edukasi mengenai SEA terhadap perempuan akibat kondisi domestik di Haiti

Jika dilihat dari sudut feminisme liberal ada beberapa hal dari keadaan domestik yang dianggap mempengaruhi atau mengakibatkan ketidaktahuan wanita Haiti dalam melaporkan tindak SEA serta membatasi keterlibatan wanita Haiti dalam aktivitas MINUSTAH.

Wanita di Haiti ketika ingin melaporkan tindakan SEA, tidak tahu jika ada tahapan pemeriksaan di Rumah Sakit untuk mendapatkan surat keterangan dan ada biaya yang ditanggungkan. Ketika mereka ingin melakukan pemeriksaan dan ada biaya, banyak dari mereka lebih memilih mundur. Selain biaya juga karena adanya ketakutan dari para wanita Haiti ketika ingin diperiksa oleh dokter pria (Bureau des Avocats Internationaux dkk, 2016, hal. 9).

Posisi wanita yang cenderung tidak bisa bersuara serta posisi wanita yang sulit mendapatkan akses kebutuhan utama selama konflik, menurut kaum feminisme liberal dianggap sebagai hasil dari minimnya keterlibatan wanita dan akses wanita terhadap pendidikan sehingga sebagian besar wanita di Haiti tidak teredukasi atau tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang SEA. Selain itu,

stigma wanita sebagai kelompok yang tidak diperhitungkan yang sudah melekat dalam budaya lokal Haiti semakin memberi dampak pasrahnya wanita Haiti ketika masuk dalam lingkaran SEA.

Feminis liberal melihat bahwa perubahan bukan hanya dilakukan oleh pihak PBB tetapi juga oleh pihak lokal yang harus sudah mulai memberikan akses pendidikan atau pelatihan agar wanita Haiti bisa terlibat dalam MINUSTAH. Kurangnya informasi atau terbatasnya akses informasi terhadap pelaporan SEA maupun terbukanya peluang bagi wanita Haiti agar terlibat dalam MINUSTAH, menyebabkan wanita yang terlibat di PBB masih minim, sehingga kebutuhan wanita agar terhindar dari perilaku SEA selama misi perdamaian terus terjadi.

4.3.2 Hypermasculinity dalam peacekeeping operation MINUSTAH

Di dalam MINUSTAH, jumlah militer yang terlibat juga jauh lebih banyak daripada jumlah kepolisian yang terlibat. *Hypermasculinity* semakin terbentuk jika dalam lingkungan yang terlibat lebih didominasi oleh pria dengan perilaku identitas maskulin yang sama ditambah dengan lingkungan lokal yang memang menempatkan wanita sebagai objek atau wisata seks bagi para *peacekeeper*. Dalam perilaku eksploitasi seksual di dalam militer, wanita seolah menjadi legitimasi bagi para tentara untuk membuktikan identitas maskulinitas mereka (Wiker, 2016, p. 13).

Maskulinitas dalam militer tidak pernah hilang termasuk dalam kasus MINUSTAH yang juga tidak lepas dari *hyper masculinity*. Tetap melekatnya *hyper masculinity* dalam militer MINUSTAH dikarenakan implementasi di lapangan cukup banyak hal yang mendukung budaya maskulinitas. Implementasi tersebut antara lain yaitu ketika tahun 2007 dimana sekitar 108 personil militer dari Sri Lanka dikeluarkan dari MINUSTAH akibat dugaan SEA. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa bagaimana mereka dapat menghindari SEA jika PBB menyediakan alat kontrasepsi kepada para personil militer (Peacewomen, 2012). Walaupun hal pembagian alat kontrasepsi tersebut guna mencegah penyebaran HIV akan tetapi secara tidak langsung memfasilitasi maskulinitas dalam militer. Jika hal tersebut tetap diimplementasikan, maka bukanlah tidak mungkin jika *hyper masculinity* tetap terus ada dan kekerasan berbasis gender tentu juga akan sangat sulit dihilangkan. Karena para pria akan terus merasa mereka didukung dan dapat melakukan apa saja terhadap para wanita.

Bagi kaum Feminis Liberal, akses keterlibatan wanita yang masih sedikit dalam militer juga turut menyumbang ketidaksertaan gender yang tentunya akan berujung perlakuan terhadap gender minoritas yang berarti disini adalah wanita sebagai kelompok yang hanya dilindungi seseuai mandat dari segala bentuk kekerasan dari kelompok bersenjata tetapi tidak dari kelompok *peacekeeper*. Timpangnya gender akan meningkatkan *hypermasculinity* yang sebenarnya harus dihindari dalam misi

perdamaian agar kepentingan wanita serta budaya di Haiti yang menjadikan wanita sebagai sex tourist juga dapat dihilangkan. Bagi kaum Feminis Liberal, meningkatkan jumlah dan peran wanita dalam misi perdamaian disegala bidang mampu mengurangi hypermasculinity yang selama ini telah ada yang juga menjadi salah satu faktor penyebab SEA.

KESIMPULAN

Peacekeeping merupakan suatu aktivitas perdamaian yang terkait dengan militer dalam rangka menstabilkan keamanan atau kondisi suatu negara yang berkonflik. MINUSTAH merupakan salah satu misi perdamaian yang bertujuan untuk menstabilkan kondisi keamanan di Haiti. Misi MINUSTAH resmi diterjunkan pada 1 Juni 2004. MINUSTAH mempunyai misi merestorasi kestabilan keamanan di Haiti akibat konflik antara kelompok pro Aristide dan kontra Aristide. Salah satu mandat MINUSTAH terkait perlindungan terhadap warga sipil, yaitu mandat PoC (*Protect of Civilian*), dalam mandat tersebut juga terdapat resolusi 1325 tentang perlindungan terhadap wanita pada area konflik dari tindakan SEA.

Namun mandat PoC yang disematkan pada MINUSTAH tidak sepenuhnya dapat terimplementais dengan baik. Banyak kekerasan terhadap wanita yang justru dilakukan oleh para *peacekeeper* MINUSTAH. Kekerasan yang dilakukan oleh para *peacekeeper* MINUSTAH yaitu berupa SEA

atau bisa juga dijabarkan sebagai bentuk kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap wanita.

SEA sendiri merupakan tindak kekerasan yang sering dilakukan oleh para *peacekeeper* hampir disetiap misi perdamaian termasuk MINUSTAH yang angka kasusnya cukup tinggi dan mendapat cukup banyak sorotan dari dunia internasional. Beban tugas untuk melindungi wanita dan anak perempuan yang dianggap rentan justru malah dijadikan oleh *peacekeeper* sebagai obyek kekerasan seksual dan eksploitasi. Hal tersebut dianggap oleh PBB sebagai suatu kegagalan mandat yang juga cukup mencoreng misi perdamaian PBB itu sendiri.

SEA itu sendiri dapat terjadi karena banyak faktor baik itu faktor dari dalam maupun faktor dari luar yang kemudian mendorong timbulnya suatu ketimpangan antara pria dan wanita baik yang kemudian berdampak pada minimnya akses wanita terhadap segala fasilitas maupun peran penting yang berpengaruh dan juga keterbatasan akses terhadap hukum atau keadilan. Sedangkan dalam *peacekeeping* itu sendiri, karena militer selalu lekat dengan maskulinitas, maka terjadi ketimpangan antara wanita dan pria yang terlibat dalam militer MINUSTAH.

Dimana kemudian hal tersebut oleh kaum feminis liberal, dianggap sebagai faktor yang semakin mendorong terbentuknya hypermaskulinitas. Militer yang dekat dengan kekerasan dan lekat dengan pria yang bebas memperlakukan wanita semakin memperkuat terjadinya pelecehan seksual terhadap wanita.

Kaum feminis liberal mengkategorikan hal tersebut sebagai wujud kekerasan berbasis gender.

Minimnya akses wanita di Haiti, secara tidak langsung menjadikan wanita sebagai kelompok minoritas yang cenderung diperlakukan sebagai korban dan bukan sebagai penyintas sehingga berujung pada pengabaian hak – hak yang penting bagi wanita. Termasuk diantaranya yaitu hak mendapatkan kebutuhan hidup sehari – hari yang cenderung sulit didapat apalagi sebagian besar aksesnya dipegang oleh militer yang terdiri dari banyak pria yang ingin memanfaatkan situasi dengan imunitas dan impunitas yang melekat pada diri *peacekeeper* tersebut.

Secara garis besar, kaum feminis liberal menarik pendapat bahwa minimnya akses wanita di Haiti, secara tidak langsung mendorong wanita di Haiti masuk ke dalam kelompok minoritas yang jarang diperhitungkan pendapat maupun suaranya dalam berbagai hal penting termasuk yang terkait dengan pembuatan kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan terkait dengan perlindungan hak wanita di Haiti termasuk mandat PoC. Sehingga kemudian kebijakan terkait hal tersebut yang dibuat oleh PBB itu sendiri tidak bisa berjalan secara optimal atau tidak dapat terimplementasi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena pada saat pembuatan kebijakan beberapa hal atau poin penting dibentuk dari sudut pandang maskulin yang kemudian secara tidak disadari maskulinitas yang berlebihan dalam satu misi dapat

berakibat pada kekerasan akibat ketimpangan gender.

SARAN

Melihat paparan kasus tersebut, maka peneliti memberikan saran untuk membuka akses bagi wanita dalam perekrutan maupun training agar wanita juga dipertimbangkan sebagai personil lapangan juga dan bukan hanya sebagai personil 'office'. Selain itu perlu adanya juga kerjasama dari pihak lokal dalam pemberian akses terhadap wanita. Karena beberapa kasus SEA ada yang tidak terungkap karena sistem pengambilan bukti SEA di Haiti sendiri juga masih sulit dan tidak memihak wanita.

DAFTAR PUSTAKA

Ebook :

Ali Suki, Coate Kelly, and Goro Wangui wa, 2000, ' Global Feminist Politics: Identities in a changing world ', Routledge, London, P. 8.

Ackerly Brooke A., 2000, ' Political Theory and Feminist Social Criticism ', Cambridge University Press, Cambridge, PP. 16-17.

Bellamy dan William, 2010, '*Understanding Peacekeeping*'.p.13-41.

Chun Suk dan Skjelsbæk Inger, 2010, 'Sexual Violence in Armed Conflicts', International Peace Research Institute, Oslo. p. 2.

Coutinho Rodrigo, 2011, ' *The MINUSTAH Peacekeeping Mission in Haiti: Has It Failed to Deliver its Desired Goals?* '. p. 4.

Evans, Judith, 1995. ' *Feminist Theory Today: an Introduction to Second-Wave Feminism* ', Sage Publications, London, p. 13.

Heathcote Gina, 2011. *Feminist Politics And the Use Of Force : Theorising Feminist Action and Security Council Resolution 1325, Social-Legal Review*, pp. 23-43.

Jennings Kathleen M., 2008, *Protecting Whom? Approaches to Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping Operations*, Allkopi AS, Norway.

Holmes Mary, 2008, ' *Gender and Everyday Life* ', Routledge, London, P. 36

Kimmel Michael S., Hearn Jeff, and Connell R. W., 2005, ' *Handbook of Studies on Men & Masculinities* ', SAGE Publications, California, P. 35.

KONAMAVID, OFARC, 2016, 'On the Abuse and Sexual Exploitation of Women, Girls, and Young Men by United Nations Agents, and the Violation of the Right to Access Remedies', Human Right Organization, Port-au-Prince, p. 4.

Nation United, 2008. *United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines*, United Nations, New York, pp. 17-18.

Nation United, 2008. *United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines*, United Nations, New York, p. 23.

Nazir Mohammad, 2003, 'Metode Penelitian'. P.27.

Patel P. dan Tripodi P., 2007. ' *Peacekeepers, HIV and the Role of Masculinity in Military Behaviour* ', *International Peacekeeping*, vol. 14, no. 5, pp. 584-598.

Scheffer Jaap de Hoop, 2016, *The Protection of Civilians in Armed Conflicts*, Advisory Council of International Affairs, The Hague.

Wiker Anna, 2016, 'Sexual Exploitation and Abuse in U.N Peacekeeping', p. 11.

Artikel :

Conduct in UN Feld Missions, 2013, <https://conduct.unmissions.org/sites/default/files/supplement_a_69_779_english_1.pdf> diakses pada 12 Juli 2019

Tong Rosemarie. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction – Liberal Feminism*. Media Released. Retrieved from <https://pages.uoregon.edu/munno/OregonCourses/REL408W03/REL408TongSummaries/Ryan-Tong.htm>

Liputan 6. (2004, Oktober 16). *Haiti Masih Dilanda Konflik*. Media Released. Retrieved from <https://www.liputan6.com/global/read/88097/haiti-masih-dilanda-konflik>

Johnston Jake, "New Report: Sexual Exploitation and Abuse at the Hands of the UN in Haiti", "Haiti Relief and Reconstruction Watch", 22 Maret 2017, <<http://cepr.net/blogs/haiti-relief-and-reconstruction-watch/new-report-sexual-exploitation-and-abuse-at-the-hands-of-the-un-in-haiti>> diakses pada 12 Juli 2019

Johnston Jake, 'New Report: Sexual Exploitation and Abuse at the Hands of the UN in Haiti', 'Center for Economic and Policy Research', 22 Maret 2017, <<http://cepr.net/blogs/haiti-relief-and-reconstruction-watch/new-report-sexual-exploitation-and-abuse-at-the-hands-of-the-un-in-haiti>>, diakses pada 10 Januari 2019.

Peacewomen, 2012, "Haiti: U.N."Outraged" at Sexual Abuse by Peacekeeper", 23 Januari 2012, <<https://www.peacewomen.org/content/haiti-un->

[outraged-sexual-abuse-peacekeepers](#)> diakses pada 12 Juli 2019

Rohter Larry, "Mission to Haiti: Overview; 3000 US. Troops Land without Opposition and Take Over Ports and Airfields in Haiti", 20 September 1994, <<https://www.nytimes.com/1994/09/20/world/mission-haiti-overview-3000-us-troops-land-without-opposition-take-over-port.html>> diakses pada 12 Juli 2019

UNA-UK, "Chair's blog: Calling time on one of the UN's most difficult missions", 20 April 2017, <<https://www.una.org.uk/news/chairs-blog-calling-time-one-un%E2%80%99s-most-difficult-missions>> diakses pada 12 Juli 2019
Indonesia, VOA. (2004, Februari 28). *Penjarahan dan Pembunuhan Masih Berlangsung di Ibukota Haiti*. Media Release. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/a-32-a-2004-02-28-7-1-85100717/7643.html>